INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

Siaran Pers
Untuk diberitakan segera

IOJI Menyoroti 9 Isu Kelautan yang Perlu Diperhatikan Paslon Capres-Cawapres

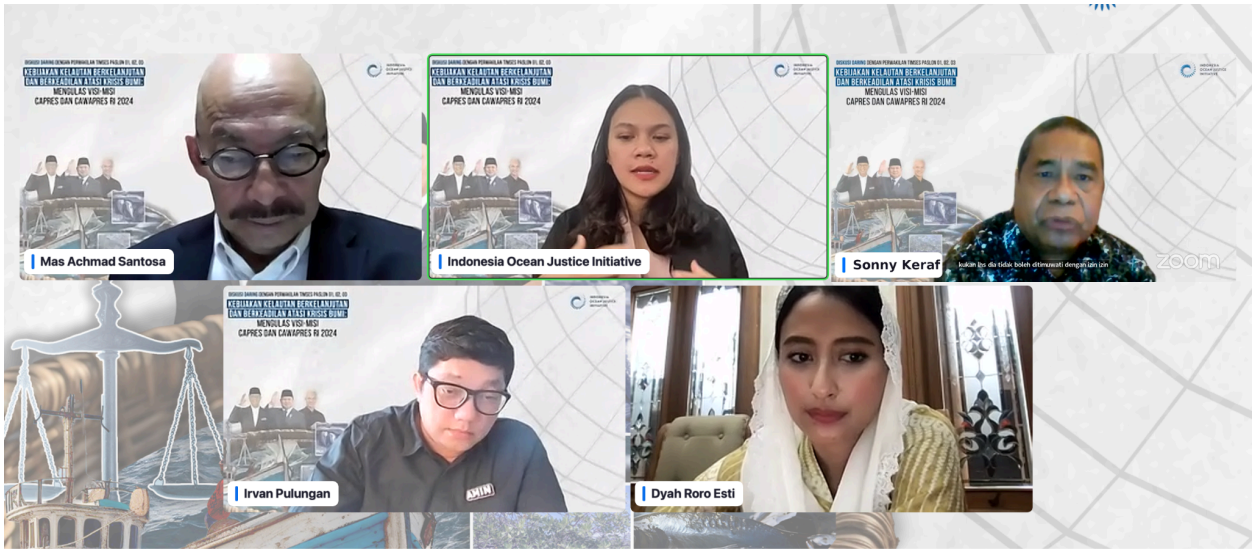

Tangkapan layar pemapar diskusi daring “Mewujudkan Kebijakan Kelautan Berkelanjutan dan Berkeadilan untuk Mengatasi Krisis Bumi: Mengulas Visi-Misi Capres dan Cawapres RI 2024” pada 2 Februari 2024.

JAKARTA - Pada era antroposen saat ini, bumi sedang menghadapi tiga krisis bumi *(triple planetary crisis)* yakni perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Tantangan tersebut juga dihadapi oleh Indonesia, dan salah satunya pada sektor kelautan.

Sebagai sumber penghidupan untuk banyak orang, upaya perlindungan ekosistem laut perlu ditingkatkan.

Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Mas Achmad Santosa mengatakan “dibutuhkan pergeseran paradigma. Bahkan *sustainable development* mulai

dipertanyakan oleh para ekologis dan *activists,* apakah masih bisa merespon krisis bumi atau *triple planetary crisis*?"

Indonesia membutuhkan pergeseran paradigma perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut menuju pengadopsian paradigma *strong sustainability*. Berdasarkan paradigma tersebut, ekosistem laut dan pesisir merupakan ekosistem yang harus ditetapkan sebagai modal alam kritis *(critical natural capitals)*. Sebab, ekosistem laut dan pesisir memiliki fungsi penting secara ekologis, sosial-ekonomi, dan kultural namun di saat yang bersamaan menghadapi berbagai ancaman.

Penetapan ini berarti, ekosistem pesisir dan laut harus dijaga secara mutlak dan tidak bisa digantikan dengan modal buatan manusia *(man-made capital)*. Pengelolaan sektor kelautan juga harus memperhatikan keadilan laut atau *blue justice*.

Berharap dapat memberikan edukasi publik mengenai bagaimana para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mempertimbangkan isu-isu tersebut pada visi-misinya, IOJI menyusun kajian "Mewujudkan Kebijakan Kelautan Berkelanjutan dan Berkeadilan untuk Mengatasi Krisis Bumi: Mengulas Visi-Misi Capres dan Cawapres RI 2024" dengan menyoroti 9 langkah prioritas:

- Mendorong efektivitas konservasi laut untuk menjaga keanekaragaman hayati
- Mendorong ekonomi biru yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan
- Melindungi dan memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir
- Mengoptimalkan peran laut dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mewujudkan keadilan iklim
- Melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil
- Menjaga keamanan maritim
- Mengatasi pencemaran laut
- Mewujudkan human security di sektor kelautan
- Mengoptimalkan *blue foods*

Berdasarkan kajian IOJI, setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sudah berupaya untuk menyusun program-program dalam rangka mewujudkan kebijakan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Terdapat beberapa program yang sudah dilengkapi dengan langkah spesifik. Contohnya, dalam rangka menjaga keanekaragaman hayati, paslon nomor urut 01 mendorong dilakukannya *stocktaking* keanekaragaman hayati di Indonesia agar upaya perlindungannya dapat efektif. Contoh lain, untuk memberdayakan nelayan, paslon nomor urut 02 akan meningkatkan upaya pemberian program kredit usaha untuk nelayan. Dalam rangka menjaga pulau-pulau kecil di Indonesia, paslon nomor urut 03 akan mencabut izin-izin pertambangan.

“Akan tetapi, terdapat beberapa program lain yang tidak dilengkapi dengan penjelasan strategi atau langkah-langkah yang lebih spesifik, melainkan terkesan seperti hanya jargon,” kata Stephanie Juwana, Direktur Program IOJI saat memaparkan hasil kajian IOJI.

Kebijakan kelautan yang mengadopsi prinsip strong sustainability dan blue justice harus didukung dengan langkah-langkah spesifik dan konkret dan dilakukan secara konsisten dan tercermin di semua sektor.

Pandangan Perwakilan Timses tentang Isu Lingkungan

Irvan Pulungan, perwakilan tim sukses (timses) pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengingatkan agar pemerintah “ bertransformasi ke pertumbuhan yang tak lagi ekstraktif, melainkan sirkular.”

Sementara itu, Dyah Roro Esti, perwakilan timses paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menyatakan Indonesia harus dapat mencapai tiga kemenangan *(triple win)*.

Masing-masing kemenangan itu adalah “menyejahterakan masyarakat tanpa melupakan nilai-nilai lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.” Menurut Esti, ketiganya “akan terus diupayakan paslon nomor urut 2.”

Sonny Keraf, perwakilan timses paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengatakan Indonesia “perlu mengembalikan paradigma negara kepulauan, menggeser paradigma dari pemanfaatan sumber daya alam menjadi mengutamakan sumber daya manusia, dan membuat fondasi-fondasi penting, salah satunya pemberantasan korupsi.”

Saat ditanya mengenai pelaksanaan program strategis nasional yang pada kenyataannya seringkali mengancam keberlanjutan ekosistem dan merugikan masyarakat setempat, Sonny Keraf menjawab “harus mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. Ada batas toleransi eksploitasi.”

Irvan menanggapi pertanyaan yang sama dengan mengatakan “pemerintah harus mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.”

***

INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: Anastasia Ika, info@oceanjusticeinitiative.org (+628118460065)

IOJI adalah lembaga think-tank dan advokasi kebijakan yang mendukung Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. IOJI membangun kolaborasi dengan aktor negara dan non-negara untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan internasional dengan menyediakan berbagai usulan kebijakan berbasis bukti ilmiah. IOJI juga melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut, seperti nelayan kecil, masyarakat pesisir dan pekerja migran pelaut perikanan, dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.